

**HUBUNGAN KONSELING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Tri Wahyuning Pujiastuti

NIM 12.93.0061

kepada

FAKULTAS PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

TESIS
HUBUNGAN KONSELING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DI KOTA YOGYAKARTA

diajukan oleh

Tri Wahyuning Pujiastuti

NIM 12.93.0061

Telah disetujui:

Pembimbing Utama

Dr.Trihoni Nalesti Dewi,SH.,MH.

Tanggal

Pembimbing Pendamping

dr.C. Tjahjono Kuntjoro,PhD.

Tanggal

TESIS

HUBUNGAN KONSELING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIADI KOTA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Tri Wahyuning Pujiastuti

NIM 12.93.0061

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 2015

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr.Trihoni Nalesti Dewi,SH.,MH

Petrus Soerjo Winoto,SH,MH

Pembimbing Pendamping

dr.C. Tjahjono Kuntjoro,PhD

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh
gelar Magester dalam Ilmu Hukum

Tanggal

Prof.Dr.Agnes Widanti,SH,CN

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh, Salam sejahtera. Alhamdulillahirobil'alamin, kami panjatkan puji syukur kehadiran Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan KB dalam perspetif HAM di kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dorongan, serta semangat dari para pembimbing dan pihak-pihak yang terkait, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Ir. Budi Widianarko, MSc selaku Rektor Universitas Soegijapranata Semarang.
2. Thomas Budi Santoso, Ed.D. selaku Dekan Paska Sarjana Universitas Soegijapranata Semarang.
3. Prof.Dr.Agnes Widanti,SH,CN selaku ketua program studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang.
4. Dr.Trihoni Nalesti Dewi,SH,M.H selaku dosen pembimbing utama kami, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan semangat serta meluangkan waktu dalam penyelesaian tesis ini.
5. dr.C Tjahjono Koentjoro, PhD selaku pembimbing pendamping kami yang telah memberikan arahan, masukan, meluangkan waktu dan semangat bagi kami dalam penyelesaian tesis ini.
6. Petrus Soerjo Winoto, SH, M Hum selaku penguji tesis kami, yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan masukan pada tesis ini.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Paska Sarjana, Program studi Magister Hukum Kesehatan yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang dapat terselesainya tesis ini.
8. Kepada Para Narasumber dan responden dari penelitian ini yang telah meluangkan waktu kesediaannya memberikan Informasi yang kami butuhkan.
9. Teman-teman angkatan 18 dan Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini.

Penyelesaian tesis ini dimungkinkan masih ada kekurangan dan kesalahan oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan untuk kesempurnaan tesis ini semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warohmatullaahi wa barokaatuh.

Semarang

2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Hipotesis	16
G. Kerangka Konsep	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak atas Informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia	19
1. Hak Asasi Manusia dalam PeraturanPerundang-undangan Republik Indonesia	19
2. Hak atas Informasi	22
3. Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Keluarga	23

B. Kesertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	25
1. Keluarga Berencana dalam Perundang-undangan Indonesia	25
2. Program Keluarga Berencana.....	
a. Sejarah Keluarga Berencana	28
b. Kebijakan program Keluarga berencana.....	32
c. Pemangku Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	33
d. Langkah-langkah Pelayanan Keluarga Berencana	33
e. Konseling dalam Pelayanan Keluarga Berencana	37
3. Pandangan Berbagai Agama tentang Keluarga Berencana	41
C. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	43
1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Dasar	43
2. Kewajiban Pemda dalam Pelayanan Kesehatan.....	44
3. Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar..	45
3. Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Kesehatan.....	47
D. Kesehatan Reproduksi.....	49
1. Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	49
2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesehatan Reproduksi.....	49
3. Hak Reproduksi dalam Pelayanan Keluarga Berencana	51
4. Pelayanan Kesehatan dalam Keluarga Berencana.....	53

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan ..	55
B. Konseling KB dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	69
C. Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana.	75

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	83
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	92



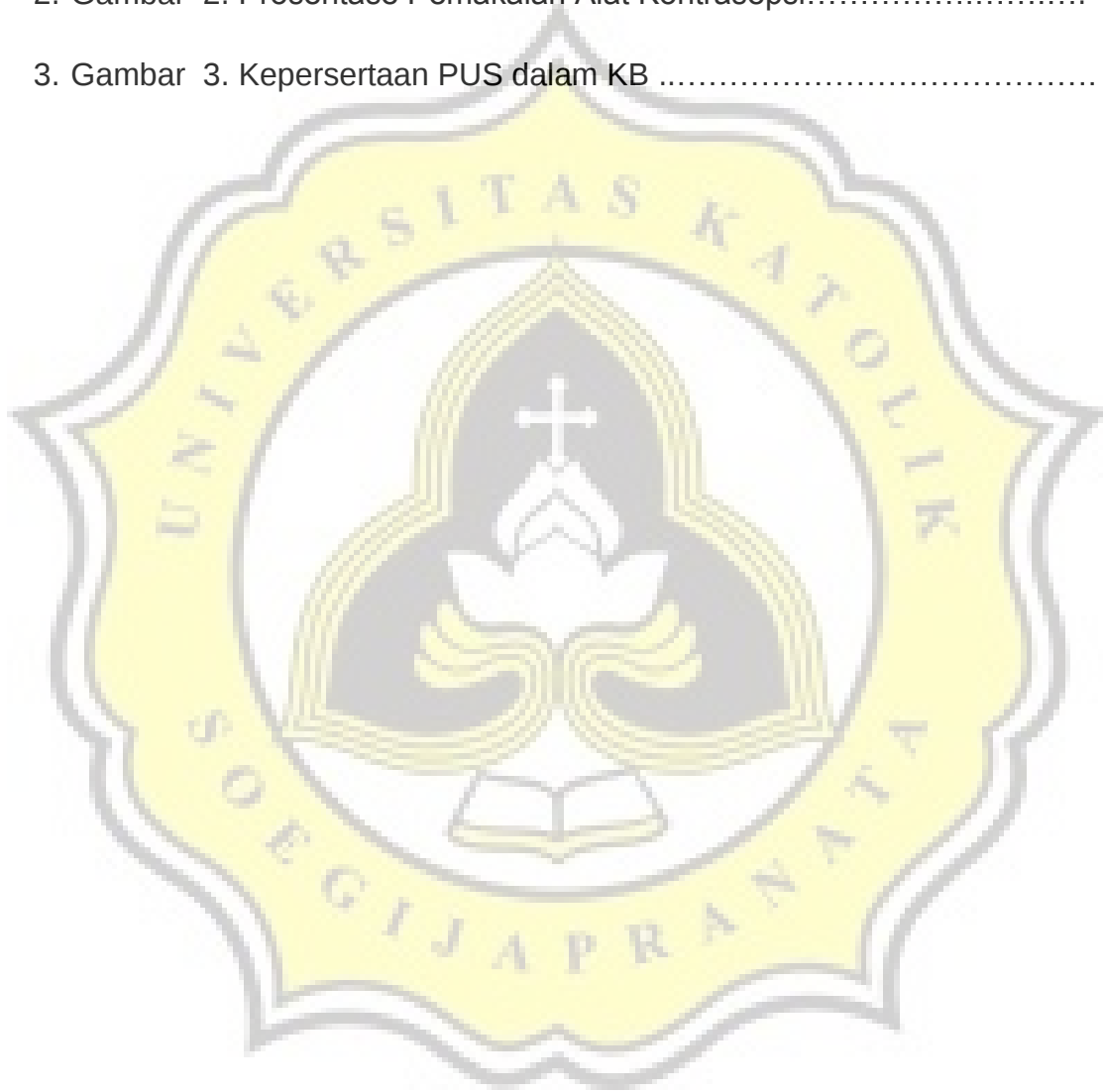
DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Hak Asasi Manusia dalam KB.....	56
2. Tabel 2. Perundang-undangan KB	62



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Kerangka Konsep.....	17
2. Gambar 2. Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi.....	34
3. Gambar 3. Kepersertaan PUS dalam KB	35



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Jadwal Penelitian.	92
2. Lampiran 2. Etika Penelitian.	93
3. Lampiran 3. Lembar Observasi	94
4. Lampiran 4. Pedoman Wawancara Untuk Responden Bidan.....	97
5. Lampiran 5. Pedoman Wawancara Untuk Calon Akseptor.....	99
6. Lampiran 6. Pedoman Wawancara Untuk Nara Sumber Kepala Puskesmas.....	102
7. Lampiran 7. Pedoman Wawancara Untuk Nara Sumber Kepala BKKBN.....	104
8. Lampiran 8. Pedoman Wawancara Untuk Nara Sumber Pelatih Pelatihan Konseling KB.....	106
9. Lampiran 9. Pengantar Penelitian	108
10. Lampiran 10. Lembar Persetujuan	109

PERNYATAAN

Yang berda tangan di bawah ini saya, Tri Wahyuning Pujiastuti, Peserta program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 12.93.0061,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang.....

Tri Wahyuning Pujiastuti

HUBUNGAN KONSELING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena menurunnya tingkat kelahiran dan meningkatnya laju kematian. Laju kelahiran yang lebih cepat dari laju kematian akan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk semakin besar sehingga perlu dilakukan pengontrolan. Salah satu program pengontrolannya adalah program KB dengan sasarannya PUS. Kondisi saat ini, masyarakat belum seluruhnya memahami pentingnya program KB dan adanya stigma ada dampak KB yang menakutkan, maka perlu kampanye KB. Era Presiden Suharto kampanye terkesan memaksa, tetapi era sekarang harus memberikan kebebasan menentukan keputusan ber-KB dengan memberikan konseling KB ber-perspektif HAM. Maka perlu dilakukan penelitian yang tujuannya untuk mengetahui signifikansi hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan ber-KB dalam perspektif HAM.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan jenis penelitian explikatif explanatif. Spesifikasi penelitian adalah kualitatif dengan variabel bebas, pelaksanaan konseling KB dalam perspektif HAM. Variabel terikat pengambilan keputusan kesertaan ber-KB. Jenis data sekunder, primer, tersier. Teknik pengumpulan data study pustaka/literatur dan dokumentasi, observasi pelaksanaan konseling dan wawancara responden serta nara sumber. Responden adalah Bidan dan calon akseptor, nara sumber kepala BKKBN DIY, kepala puskesmas, tim pelatih konseling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling KB dalam perspektif HAM telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu hak atas informasi terhadap kesehatan diri seseorang, pelaksanaan konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan ber-KB sudah dilaksanakan sebelum ber-KB dan sesuai standar, serta keputusan memilih metode kontrasepsi atas kesadaran sendiri dan tidak merasa ada keharusan/paksaan maka dapat dikatakan ada signifikansi hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan ber-KB dalam perspektif HAM. Hal ini karena calon akseptor yang sudah diberikan konseling merasa lebih memahami tentang metode kontrasepsi yang dipilihnya dan dapat menentukan sendiri secara sukarela. Namun masih ada beberapa hambatan yang ditemui adalah pengaruh keluarga, keyakinan agama, gangguan konsentrasi karena kesakitan, dan hanya tersedia metode kontrasepsi IUD pasca plasenta di rawat inap, sehingga belum semua calon akseptor setelah diberi konseling mengambil keputusan ber-KB.

Kata kunci : Konseling, Hak Asasi Manusia, Keluarga Berencana, Pengambilan keputusan.

RELATIONSHIP BETWEEN COUNSELING AND SELF DECISION OF FAMILY PLANNING PARTICIPATION IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN THE CITY OF YOGYAKARTA

ABSTRACT

The rate of population growth can be controlled by the lower birth rate and the higher death rate. When the birth rate is higher than the rate of death, the population growth rate is increased. In hence, it requires to be controlled. One of the controlling programs is family planning program (KB) to fertile couple (PUS). Current conditions, it is not understood the importance of family planning programs and the negative perception of KB, so it is necessary to campaign KB. In the era of President Suharto, the KB campaign impressed force, but now it has to give right to take family planning decisions by providing family planning counseling caring the human rights. So it is necessary to conduct this research. The purpose of this research is to determine the significance relationship between the family planning counseling and decision of family planning participation in a human rights perspective.

This research method used juridical sociology with *explikatif explanatif* type. Research specifications are qualitative independent variable, decision making participation in family planning counseling as dependent variable in implementation of family planning counseling in human rights perspective. Data collection techniques were conducted by studying the literature and documentation, observation and interview of family planning counseling implementation. The respondents are midwife as family planning counselor, candidate acceptor (PUS), stakeholder from DIY BKKBN and community health centers.

The results showed that the implementation of family planning counseling in a human rights perspective set in some of the legislation laws for the right to information of the personal health and the counseling of family planning participation decision has been implemented according to the SOP and conducted before the participation. Decision-making participation in family planning and choice of contraceptive methods was conducted by themselves; there is no any compulsion because they felt more understand about the contraceptive method chosen after taking counseling. Barriers were the influence of family and religious beliefs, morbidity concentration problems, only directed to post-placental IUD. The counseling result is that not all PUS takes the family planning program.

Keywords: Counseling, Human Rights, Family Planning, Decision-making